

Peradaban Islam Di Nusantara Pasca Kemerdekaan dan Perkembangan Pendidikannya

Amelia Meimatul Lutfiyah¹, Sisca Amalia Putri^{2*}, Hikmah Fitrotun Nabila³

^{1,2*,3}Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia

Email: ¹amelia.meimatul20@gmail.com, ^{2*}putrisiscaamalia@email.com, ³hikmahfitrotunn@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 15-06-2026

Accepted : 10-07-2026

Published : 15-08-2026

Keywords:

The Development of Islam
Indonesian Educational
Institutions
Religious Values

Abstract

Islam is a faith that upholds the values of justice and truth for everybody of it's followers. The elements that encouraged Muslims to contribute to Indonesia's struggle for independence include ideological, sosial, cultural, political, and economic aspects. Islam in Indonesia plays a significant function in education and has made substantial contributions to the advance of society. Islamic education is implemented through three educational pathways: formal, informal, and non-formal education, each of which plays an important role in fostering religious values, character, and moral development among learners. Following Indonesia gained autonomy, religious instruction received the government's earnest attention in both privat and government institutions. The government also supported the establishment and development of Islamic educational establishments, especially Islamic boarding schools (pesantren) and prayer houses (musala), as centers for religious guidance and community education. These institutions have helped raise the standard of education, strengthening religious identity, and shaping morally upright generations. Consequently, it's crucial to examine Islam's growth in Indonesia and the progress of Islam educational Institutions during the post autonomy period, as well as their contributions to enhancing the quality of human resources, strengthening national unity, and supporting sustainable national development.

Abstrak

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran bagi seluruh pemeluk agama islam. Berikut merupakan faktor-faktor yang mendorong umat Islam dalam meraih kemerdekaan Indonesia meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, Islam memiliki peran yang sangat penting didalam bidang keilmuan serta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan masyarakat. Pendidikan Islam dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam membentuk nilai-nilai keagamaan, karakter, serta moral peserta didik. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama memperoleh perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah juga mendukung pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren dan musala, sebagai pusat pembinaan keagamaan dan pendidikan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat identitas keagamaan, serta membentuk generasi yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perkembangan Islam di Indonesia serta kemajuan lembaga pendidikan Islam pada masa pascakemerdekaan beserta kontribusinya dalam meningkatkan nilai kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan bangsa, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Perkembangan Islam, Lembaga Pendidikan Indonesia, Nilai Keagamaan

1. PENDAHULUAN

Sekitar abad ke-13, pedagang dari Arab dan Gujarat membawa agama Islam ke Indonesia. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat, terutama di pulau Sumatera dan Jawa. Proses Islamisasi Indonesia berlangsung melalui berbagai cara, seperti perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Ketika Islam mulai menyebar di Jawa pada abad ke-15, Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama yang kuat. Islam di Indonesia mengalami berbagai dinamika selama bertahun-tahun melalui dengan kemajuan zaman.

Pada masa pemerintah kolonial Belanda, misalnya, menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi pengaruh Islam. Namun, Islam bertahan dan bahkan mengalami revitalisasi melalui organisasi reformis seperti Muhammadiyah, yang didirikan pada 1912 dan Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, posisi Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia semakin kuat. Menurut sensus penduduk tahun 2020, sekitar 87,18% dari total penduduk Indonesia adalah Muslim, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam sebuah kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mereka[1].

Masuknya Islam ke Nusantara ini adalah suatu bagian penting dari sejarah perkembangan pendidikan Islam. Proses tersebut terjadi melalui berbagai jalur, terutama perdagangan dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang serta ulama dari berbagai wilayah. Pada abad ke-17 seiring berkembangnya hubungan antara Nusantara dan Timur Tengah, terbentuk jaringan ulama yang berperan dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam. Jaringan keilmuan ini tidak hanya memperkuat penyebaran ajaran Islam, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual dan sistem pendidikan Islam di Nusantara[2].

Beberapa tokoh penting saat ini juga berkontribusi besar pada kemajuan pendidikan Islam. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, merevolusi pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan pendidikan kontemporer. Selain itu, pesantren didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Asy'ari, sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya menekankan pada ilmu agama tetapi juga menangani tantangan zaman dengan memasukkan ilmu-ilmu umum. Madrasah dan pesantren tetap berdiri dan berkembang meskipun dipaksa oleh pemerintah kolonial, menunjukkan kekuatan dan keluwesan yang luar biasa. Mereka tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama tetapi juga tempat semangat nasionalisme dan perlawanan, mempersiapkan orang-orang untuk berperan penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia di masa depan. Sejarah pendidikan Islam sebelum kemerdekaan ini memberikan fondasi yang kuat untuk pendidikan Islam di Indonesia ini setelah kemerdekaan[3].

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki latar belakang sejarah dan kebudayaan. Itu dimulai pada abad ke-8 M dan telah berkembang selama lebih dari 12 abad. Pendidikan Islam telah memiliki efek yang sangat positif pada budaya dan kehidupan masyarakat di sebagian besar wilayah negeri ini. Akibatnya, nilai-nilai Islami telah menjiwai dalam kehidupan masyarakat dan individu di berbagai wilayah Indonesia ini, seperti yang terlihat pada perilaku sosial yang mendorong ukhuwah Islamiyah (kegiatan gotong royong), sikap dan pandangan religius serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa[4].

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, terdapat tiga periode pendidikan Islam: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Karena Indonesia baru saja mendapat kemerdekaan dan tidak memiliki sistem pemerintahan yang kuat pada masa Orde Lama, pendidikan Islam tidak mendapat perhatian yang cukup. Setelah masa Orde Lama berakhir, pendidikan Islam mengalami kemajuan dan berkembang dengan baik di era Orde Baru. Banyak kemajuan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di era Orde Baru digunakan untuk meningkatkan pendidikan Islam. Selama masa reformasi, fokus utama reformasi pendidikan Islam adalah untuk memantapkan posisinya dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pada periode reformasi yang berbeda dengan periode reformasi sebelumnya, sejumlah kebijakan baru dibuat. Sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, perjalanan pendidikan Islam berubah. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang pendidikan Islam di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan[5].

Studi sebelumnya telah mengeksplorasi sejarah dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian berfokus pada sejarah masuknya Islam dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah. Pada Studi lain lebih berfokus pada kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di masa lalu, seperti pada saat Orde Baru maupun pada saat Reformasi, serta kontribusi organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kebijakan pemerintah. Namun, ada sedikit penelitian yang menguraikan secara menyeluruh perkembangan pendidikan Islam sejak Indonesia merdeka hingga era Reformasi.

Sebagian besar penelitian hanya mengkaji satu periode pemerintahan atau satu aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesinambungan kebijakan, perubahan sistem pendidikan Islam, serta tantangan yang dihadapi pada setiap periode. Berdasarkan kondisi tersebut, muncullah penelitian ini untuk mengisi kesenjangan (*gap*) menyajikan kajian literatur yang mengintegrasikan perkembangan pengetahuan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada era Reformasi dalam satu pembahasan yang utuh. Selain menguraikan perubahan kebijakan pemerintah, penelitian ini juga menganalisis dampaknya terhadap perkembangan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Kajian ini menjadi penting karena pendidikan Islam terus menghadapi tantangan baru, seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan mutu sumber daya manusia, penguatan moderasi beragama, serta penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, pemetaan perkembangan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menjadi sumber referensi bagi pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Pemilihan metode penelitian yang tepat adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, karena menentukan kualitas proses pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan dengan meninjau literatur buku-buku, jurnal, dan media elektronik, serta beberapa referensi mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) memiliki keterkaitan dengan topik sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan; (2) berasal dari sumber ilmiah yang kredibel, seperti artikel jurnal, buku, dan prosiding; (3) diterbitkan dalam jurnal yang telah melalui proses penelaahan sejawat (peer review) atau diterbitkan oleh lembaga akademik yang terpercaya; serta (4) menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Studi literatur adalah sebuah metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang terkait untuk memperoleh sebuah informasi, data, dan konsep mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu.

Studi literatur dimulai dengan mengumpulkan referensi dari sebuah penelitian sebelumnya, yang kemudian dianalisis dan dipelajari lebih mendalam untuk lebih lanjut dalam mencapai kesimpulan. Penelusuran literatur ini kami lakukan melalui beberapa basis data ilmiah seperti Google Scholar. Literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi *tahun 2013–2026* agar data yang diperoleh tetap mutakhir dan sesuai dengan perkembangan kajian ilmiah. Setelah proses seleksi, literatur dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengklasifikasikan informasi, membandingkan persamaan dan perbedaan, serta menyintesis hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dimana data-data yang diperoleh dievaluasi melalui klasifikasi, penemuan hubungan dan perbedaan, penyampaian perspektif, dan penggabungan (sintesis). Hasil yang dapat diambil dari gabungan antara kebijakan orde baru dengan orde lama dapat menyajikan perbedaan yaitu pada perkembangan pendidikannya dan tantangan yang dihadapi pada saat ini[6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradaban Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial berlangsung dalam situasi yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda, sejak abad ke-17 membawa sejumlah tantangan bagi kehidupan umat Islam. Kendati demikian, ajaran Islam tetap mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di tengah masyarakat pribumi. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda menjalankan berbagai kebijakan yang cenderung membatasi ruang gerak umat Islam, termasuk dalam bidang pendidikan keagamaan, sementara pendidikan dengan orientasi sekuler dan bercorak Barat lebih banyak mendapat dukungan. Menghadapi keadaan tersebut, para ulama dan tokoh pergerakan Islam menunjukkan respons yang aktif dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam serta membentuk organisasi keagamaan sebagai sarana memperkuat kehidupan umat. Salah satu wujudnya terlihat dari berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 yang berfokus pada pengembangan pendidikan keagamaan sekaligus kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh kolonial juga tampak dalam munculnya berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Sejumlah tokoh Muslim, seperti Haji Agus Salim dan Ki Hajar Dewantara, turut mengambil bagian dalam perjuangan nasional untuk menghadapi kekuasaan Belanda dengan mengembangkan semangat nasionalisme dan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada awal abad ke-20, tercatat lebih dari 1.000 masjid didirikan di berbagai wilayah Indonesia dan berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang berlangsungnya aktivitas sosial serta keagamaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim tetap berupaya mempertahankan sekaligus memperkuat identitas dan rasa kebersamaan mereka meskipun berada dalam tekanan pemerintahan kolonial. Pada akhirnya, perjalanan perkembangan Islam di Indonesia sepanjang masa kolonial mencerminkan kemampuan umat untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan menghadapi berbagai hambatan. Keteguhan tersebut menjadi dasar penting bagi umat Islam untuk menjaga keyakinan sekaligus memberikan kontribusi terhadap perjuangan menuju kemerdekaan. Oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka, Islam memiliki posisi yang signifikan dalam proses pembentukan dan penguatan identitas nasional bangsa Indonesia[1].

Peradaban Islam merupakan istilah yang berasal dari terjemahan al-Hadārah al-Islamiyyah, yaitu perpaduan antara konsep peradaban dan ajaran Islam. Para sejarawan sepakat bahwa lahirnya agama Islam melahirkan sebuah peradaban yang dikenal sebagai peradaban Islam. Awal kemunculannya di Jazirah Arab, pertumbuhannya sejalan dengan penyebaran agama Islam. Peradaban Islam dibangun di atas kebudayaan Islam yang berlandaskan nilai, pemikiran, dan ajaran agama. Oleh karena itu, agama Islam bukanlah peradaban atau kebudayaan itu sendiri, melainkan menjadi sumber utama yang melahirkan serta membentuk perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam[7]. Secara geografis, peradaban Islam berawal dari Kota Makkah yang menjadi pusat lahir dan berkembangnya ajaran Islam. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim A.S. dipandang sebagai tokoh yang meletakkan dasar kawasan suci Makkah. Penetapan batas-batas wilayah tersebut dilakukan atas petunjuk Malaikat Jibril a.s. Selanjutnya, pada saat penaklukan Kota Makkah, Rasulullah saw. menugaskan Tamim bin As'ad Al-Khuza'i untuk memperbarui dan menegaskan kembali batas-batas wilayah suci tersebut. Batas-batas yang telah ditetapkan kemudian tetap dipertahankan hingga masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab. Pada masa

kepemimpinannya, Umar menugaskan beberapa tokoh dari kalangan Quraisy untuk melakukan pembaruan dan penegasan kembali tapal batas Kota Makkah sebagai upaya menjaga kejelasan wilayah suci tersebut[8].

Didalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Islam juga mempunyai peranan yang sangatlah besar dalam usaha meraih tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangatlah jauh, bahkan sebelum masa kemerdekaan hingga kini, ajaran Islam telah ada. Sejarah mencatat bahwa Memasuki permulaan abad ke-20, sejumlah tokoh pergerakan, para ulama, serta kalangan aktivis mulai berperan aktif dalam berbagai upaya perubahan di tengah masyarakat, serta cendekiawan Islam Indonesia juga terlibat secara langsung dalam upaya memberikan pengetahuan, dan kepekaan politik kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan[9].

Keberadaan Islam di Indonesia telah diterima sebagai bagian dari budaya, meskipun Islam tidak diperbolehkan membentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Islam diakui sebagai sumber moral dan budaya, tetapi bukan dalam konteks kekuasaan politik yang sebenarnya. Pada saat masa Orde Lama, munculnya Islam diberi posisi yang khusus dalam tatanan yang penuh kontradiksi, terutama pada arena politik. Sementara itu, pada era Orde Baru, Islam terlihat memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat, lebih dipandang terutama nilai-nilai Islam dapat dijadikan sebagai pijakan etis dalam proses pembangunan bangsa dan penyelenggaraan negara[10].

Munculnya pemerintahan Orde Baru pada awalnya disambut dengan harapan sangatlah besar oleh umat Islam karena mereka turut berperan dalam proses terbentuknya rezim tersebut. Banyak kalangan Muslim berharap memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pembangunan nasional. Namun, pada praktiknya pemerintah Orde Baru lebih memusatkan perhatian pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, sehingga aspirasi politik umat Islam belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan. Masa pemerintahan Orde Baru secara resmi berakhir pada 21 Mei 1998, yang menandai dimulainya masa Reformasi. yang ditandai dengan berkembangnya berbagai gerakan sosial dan politik. Pada masa ini, wacana mengenai Piagam Jakarta serta peningkatan peran syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan kembali menjadi bagian dari diskursus publik. Terkait penerapan syariat Islam, muncul beragam pandangan di kalangan organisasi dan kelompok Islam mengenai bentuk serta ruang lingkup implementasinya dalam kehidupan bernegara. Selain itu, pemberlakuan penerapan kebijakan desentralisasi pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan kekuasaan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, beberapa daerah mulai menerapkan peraturan daerah yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merespons aspirasi keagamaan di era Reformasi[11].

Kondisi Sosial serta politik setelah Indonesia resmi merdeka pada tahun 1945, berbagai aspek kehidupan sosial dan politik mengalami perubahan yang cukup besar. Perkembangan tersebut tidak hanya memengaruhi sistem dan tata kelola pemerintahan, tetapi turut membawa perubahan dalam kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya dalam perkembangan Islam. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembentukan identitas nasional sekaligus memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat[1].

Kerajaan Islam menjadi kekuatan politik dan menjadikan pengembangan budaya lebih efektif dalam menjangkau masyarakat. Pengaruh yang diberikan kepada masyarakat dalam penyebaran nilai-nilai Islam menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelum berdirinya kerajaan yang hanya membentuk komunitas muslim di pusat perdagangan[12]. Pada masa era setelah kemerdekaan, beberapa tokoh politik Islam mulai muncul. Dalam ranah kepartaian, terdapat dua organisasi politik yang memiliki peranan utama. berusaha untuk menjadi kelompok yang memiliki pengaruh terbesar di kalangan umat Muslim dalam negara republik yang baru berdiri tersebut. Sementara itu, kedua kelompok tersebut menggambarkan. sejarah pembagian di kalangan umat Islam. NU mengusung pandangan yang lebih bersifat tradisional, serta nonmodernis, sementara Partai Masyumi hadir sebagai salah satu organisasi politik Islam yang mengusung gagasan pembaruan dan modernisme. Mereka bersaing untuk memimpin masyarakat Indonesia memiliki ketertarikan terhadap pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dan sangat menolak dampak yang sekuler dan khususnya komunis[13].

Gabungan lembaga Islam dalam Masyumi tersebut hanya eksis selama enam tahun. Ketidakcocokan pendapat, disebabkan oleh dominasi golongan modernis di Masyumi serta perwakilan di lembaga legislatif dan perselisihan mengenai kelayakan bagi pejabat kementerian agama pada waktu itu, memicu para kiai yang bernaung di bawah organisasi NU untuk meninggalkan Masyumi pada tahun 1952. Penarikan diri ini menunjukkan bagaimana para kiai NU menjalankan apa yang dapat disebut sebagai “kewajiban politik”. Partisipasi dalam politik ini semakin meyakinkan para kiai bahwa ini merupakan jalur paling efisien dalam memperjuangkan kepentingan sosial dan keagamaan NU. Kekuasaan, otoritas, dan sumber daya dapat diraih melalui jalur politik atau lembaga keagamaan yang telah ada. Para kiai lantas menyatakan Nahdlatul Ulama’ (NU) sebagai sebuah partai politik. Keberadaan NU sebagai partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 1955 tidak bisa diabaikan. Bukti bahwa ada dukungan yang kuat terhadap para kiai NU menjadikan NU sebagai partai politik yang meraih posisi ketiga dalam pemilu, berada pada peringkat barisan di belakang PNI dan Masyumi[14].

Perkembangan Pendidikan Pasca Kemerdekaan dan Lembaga Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Sejarah pendidikan islam dimulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan islam, masa penjajahan kolonial, sampai masa penjajahan jepang tentunya saling berkaitan satu sama lain. Pendidikan itu bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu[6].

Berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi telah memengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai contoh, perubahan arah kebijakan pemerintah, yang semula berfokus pada upaya domestikasi kemudian beralih ke pendekatan yang lebih akomodatif, turut memengaruhi posisi serta perkembangan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional [3].

Seiring seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan ajaran agama sebagai pertahanan terhadap ideologi komunisme, pendidikan Islam mulai berkembang dengan selaras. Pemerintah memulai langkah dengan mengawasi perkembangan pendidikan agama Islam dengan memodelkan ulang program pendidikan Islam sebelumnya untuk meningkatkan kekuatan institusi. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam perjalanannya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang belum tertata secara konsisten. Berbagai persoalan tersebut pada dasarnya bukanlah fenomena baru, melainkan telah muncul dan berkembang sejak masa-masa awal setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya[15].

Pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan terbagi menjadi dua kategori, yakni: Pendidikan Islam sebagai institusi yang pertama bertumbuh kembang dengan pesat pada masa kemerdekaan, seperti; pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

Pesantren yang telah berkembang selama ratusan tahun, pada era kemerdekaan mendapat tempat untuk berkembang[10]. Banyak sekali jenis lembaga pendidikan yang dapat dijumpai di wilayah Nusantara ini, salah satunya yaitu pesantren yang merupakan lembaga pendidikan yang paling awal dijumpai di Nusantara[2]. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren merupakan peraturan perundang-undangan yang secara resmi disahkan pada 18 Oktober 2019, yakni mengatur kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia[4]. Pesantren memiliki tujuan untuk mempromosikan islam yang moderat yaitu islam yang memberikan manfaat bagi seluruh makhluk, dan hingga saat ini terus menjaga pengajaran sikap yang inklusif, terbuka, serta seimbang. Pesantren bukan hanya sekedar lembaga tetapi juga merupakan "inti" dari perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Karena kemampuannya dalam melestarikan ajaran asli sekaligus beradaptasi dengan budaya setempat. Pesantren ini berfungsi sebagai benteng pemikiran yang memastikan bahwasannya pandangan Islam tetap berakar meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan kolonialisme[16].

Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam: Dengan memperoleh kemerdekaan, Pendidikan Islam mendapatkan peluang untuk meningkatkan mutunya. Sasaran ini mencakup peningkatan kualitas pengajar, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, serta metode pengajaran yang lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Mendorong Toleransi Antara Agama: Pendidikan Islam juga memiliki tujuan untuk membentuk sikap toleransi dan saling pengertian antara umat Islam dan penganut agama lainnya. Pendidikan harus mendorong kerukunan antarumat dan menghindari sikap ekstremisme. Menghasilkan Generasi yang Memberikan Sumbangsih Positif: Pendidikan Islam harus mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan masyarakat dan negara. Target ini mencakup persiapan siswa untuk menjadi pemimpin, tenaga kerja yang terampil, dan warga negara yang bertanggung jawab. Pengembangan Riset dan Pengetahuan: Pendidikan Islam juga harus berfungsi sebagai pendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam perspektif Islam, serta mendorong siswa untuk melanjutkan studi lebih lanjut[17].

Perkembangan universitas Islam negeri dan swasta, seperti transformasi IAIN menjadi UIN, berkontribusi signifikan dalam membentuk pendidikan Islam untuk menjawab tuntutan dan kemajuan masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki tema yang sebanding. Sebagian studi mengeksplorasi dinamika pendidikan Islam dari segi tujuan, fungsi, dan tantangan yang dihadapi. Sebagian lainnya mengelompokkan pembahasan dalam periode sejarah, mulai dari era kolonial Belanda dan Jepang, Era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, namun sering kali kesimpulan yang dihasilkan tidak fokus pada satu aspek pendidikan; terkadang lebih memusatkan perhatian pada kebijakan, terkadang pada perkembangan lembaga, dan kadang pada kurikulum, dan lain-lain. Di sisi lain, ada pula penelitian yang membahas periode tertentu, seperti pendidikan Islam pada Orde Lama, Orde Baru, atau Reformasi, dengan pendekatan yang bisa sangat luas dalam berbagai aspek pendidikan atau lebih sempit hanya pada beberapa aspek saja[15].

Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Orde didefinisikan dengan zaman, dan dalam konteks ini, orde lama mewakili periode pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga penggantinya pada tahun 1965 melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, juga dikenal sebagai Supersemar. Setelah dikuasai oleh kolonial Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun, Indonesia baru saja melepaskan diri dari penjajahan. Sebagai negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan, Indonesia masih mencari cara dan identitas untuk menjadi negara Republik yang kuat berdasarkan dasar-dasarnya.

Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam kurang diperhatikan karena negara baru mendapat kemerdekaan dan tidak memiliki landasan yang kuat. Karel A. Stenbrink menyatakan bahwa Departemen Agama adalah langkah pertama pemerintah untuk mengatur pendidikan Islam. Ini memungkinkan pemerintah untuk membangun pendidikan keagamaan yang diselenggarakan melalui jalur resmi dalam suatu lembaga atau institusi. Sejak kolonial Belanda. Kantor Voor Inlandshe Zaken telah ada atau dikenal sebagai Departemen Agama. Pada era penjajahan Jepang, itu disebut Shumuka.

Pasca-kemerdekaan Indonesia pada 3 Januari 1945, lembaga tersebut mengalami perubahan nama menjadi Kementerian Agama. Sementara itu, pada masa pemerintahan Orde Lama, pemerintah turut membentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki peran dalam mengatur serta mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian: pendidikan agama dan umum[5].

Pada Masa pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1966 yang dikenal sebagai Orde Lama. Pada saat ini, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan presiden sebuah peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan politik negara. Hubungan antara pemerintah dan kelompok Islam berubah karena sebagian kalangan umat Islam menganggap sistem tersebut tidak memungkinkan aspirasi politik Islam[18].

Pada periode tahun-tahun ini, pendidikan di Indonesia lebih menekankan pembangunan nilai-nilai nasionalisme dan identitas bangsa, serta pembentukan fondasi ideologis untuk kehidupan bangsa adalah pembangunan negara dan karakter. Sejumlah tokoh nasionalis bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan nasional. Mereka memegang banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat tokoh-tokoh yang menempati jabatan strategis sekaligus berperan aktif dalam menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama untuk membangun ideologi negara serta membentuk karakter kehidupan bangsa, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Salah satu tokoh tersebut adalah Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama, yang dikenal sebagai bapak pendidikan, menerapkan kebijakan umum dan menginstruksikan semua kepala sekolah serta guru untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Yang pertama, bendera Merah Putih dikibarkan setiap hari di lingkungan sekolah. Kedua, para siswa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, pengibaran bendera Jepang dihentikan dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, tidak lagi digunakan. Keempat, pembelajaran Bahasa Jepang serta kegiatan upacara yang ditujukan untuk memberikan penghormatan kepada tentara Jepang ditiadakan. Kelima, para peserta didik diberikan dorongan untuk membangun semangat kemerdekaan. Dalam situasi tersebut, pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk jiwa nasionalisme sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan agar kemerdekaan dapat dipertahankan dan diwujudkan secara nyata. Selanjutnya, pada 1946, Departemen Pendidikan menerbitkan pedoman yang ditujukan bagi para guru. Pedoman tersebut menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan di Republik Indonesia. Secara substansial, pedoman tersebut berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[2].

Pada bulan Desember tahun 1949, terjadi transformasi dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Dengan Pada periode tersebut, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) mulai digunakan sebagai dasar hukum negara untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang mengatur mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Dalam Bab II Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan nasional diarahkan pada pembentukan individu yang memiliki akhlak yang baik, kompeten, serta mampu menjalankan peran sebagai warga negara yang demokratis dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Dengan demikian, sistem pendidikan yang diterapkan pada masa itu berorientasi pada pengembangan sikap demokratis, rasa tanggung jawab, dan jiwa kebangsaan dalam diri setiap peserta didik. Penerapan nilai-nilai demokrasi juga terlihat di lingkungan perguruan tinggi yang mulai memberikan ruang lebih luas bagi kebebasan akademik. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta berorganisasi sesuai dengan pilihan dan pandangan masing-masing. Meskipun dinamika politik di kalangan mahasiswa cukup tinggi, kondisi tersebut mencerminkan berkembangnya kehidupan akademik yang lebih terbuka Pada periode Orde Lama, sistem pendidikan di Indonesia dibagi ke dalam tiga tingkatan pokok. Tingkat pertama adalah pendidikan dasar, yang mencakup pendidikan taman kanak-kanak dengan masa belajar satu tahun, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Dasar (SD) selama enam tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, peserta didik dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), baik dari jalur pendidikan umum maupun kejuruan. Adapun jenjang ketiga adalah pendidikan tinggi yang mengalami perkembangan cukup pesat pada periode 1945–1950. Perguruan tinggi terbuka bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, meskipun proses perkuliahan sering kali terganggu oleh situasi atau kondisi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Lembaga pendidikan tinggi pada masa itu berbentuk universitas, sekolah tinggi, dan akademi. Di tengah berbagai keterbatasan sarana dan kondisi politik yang masih belum stabil, para pendidik tetap melaksanakan tugasnya dengan sangat penuh dedikasi. Upaya tersebut berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang mampu berperan sebagai pemimpin bangsa pada masa-masa awal kemerdekaan. Untuk mengembangkan akses pendidikan tinggi, pemerintah juga menetapkan kebijakan pendirian perguruan tinggi di berbagai provinsi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan nasional[2].

Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru terjadi setelah pemerintahan sebelumnya dinilai telah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, pemerintahannya dituduh melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta menggeser kedudukan Pancasila melalui konsep Nasakom, yaitu perpaduan antara Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Selain itu, Soekarno juga disebut memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S

PKI) tersebut menyebabkan gugurnya tujuh orang jenderal serta seorang putri dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Berbagai peristiwa tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Soekarno dan mengalihkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Sejak saat itu, Indonesia memasuki babak pemerintahan baru yang dikenal sebagai Orde Baru, menandai berakhirnya era Orde Lama[5].

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, arah dan kebijakan pendidikan mengalami penataan yang lebih sistematis sebagai upaya mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perkembangan serta tuntutan global di berbagai bidang kehidupan. Pada periode tersebut, pemerintah juga mulai membangun dan menerapkan Pendidikan di Indonesia telah berkembang dalam suatu sistem yang disusun dan dikelola secara nasional. Dalam kerangka tersebut, madrasah juga diakui sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal yang mempunyai posisi dan derajat yang sejajar dengan sekolah umum negeri sekolah umum negeri[15].

Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja maupun sebagai bekal bagi siswa yang mempunyai keinginan untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Meskipun demikian, sistem pendidikan nasional masih menghadapi berbagai rintangan, salah satunya ialah kuatnya pengaruh dari aturan yang bersifat sentralistik dan kurang memberikan ruang bagi pengembangan potensi masyarakat. Kondisi ini terlihat jelas pada masa Orde Baru yang berlangsung sekitar lebih dari 32 tahun. Pada periode tersebut, pemerintah berhasil menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan, terutama dari sisi kuantitas, seperti meningkatnya jumlah sekolah dan pembangunan berbagai sarana pendidikan. Namun, keberhasilan tersebut belum diikuti sepenuhnya oleh peningkatan kualitas pendidikan maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Akibatnya, meskipun akses pendidikan semakin luas, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pendidikan sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup masih belum berkembang secara optimal[2].

Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan kondisi politik dan perekonomian yang relatif stabil, namun pada saat yang sama menerapkan kebijakan yang mendorong penyeragaman budaya serta penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui sektor kesenian. Dalam konteks tersebut, perkembangan Seni kaligrafi Islam yang pada masa sebelumnya umumnya dikerjakan secara individual, kemudian mulai mengalami perubahan dengan diarahkan ke bentuk kegiatan yang lebih terorganisasi dan dikembangkan melalui wadah yang lebih terorganisasi. Salah satu bentuknya dapat dilihat dari penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam skala nasional pada tahun 1968[19].

Pada masa awal kemerdekaan, penyelenggaraan pendidikan di negara ini difokuskan dengan pembentukan nilai-nilai nasionalisme, penguatan identitas nasional, serta pengembangan landasan ideologis dalam menjalani kehidupan sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan pada periode tersebut bertujuan untuk diarahkan pada nation and character building, yaitu membangun karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Pelaksanaan pendidikan nasional banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis yang menempati berbagai situasi strategis dalam pemerintahan. Melalui peran tersebut, pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan ideologi negara sekaligus membentuk karakter masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

Ki Hajar Dewantara tercatat sebagai tokoh yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (PP dan K) pertama di Indonesia, menetapkan berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan memperkuat semangat kebangsaan. Kebijakan tersebut antara lain mewajibkan pengibaran Bendera Merah Putih di lingkungan sekolah setiap hari, juga lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, menghentikan penggunaan simbol-simbol Jepang seperti bendera dan lagu kebangsaan Kimigayo, menghapus mata pelajaran Bahasa Jepang dan tradisi yang berasal dari pemerintahan militer Jepang, dan menanamkan rasa kemerdekaan pada semua siswa.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, tujuan akademik nasional saat awal kemerdekaan dengan lebih menekankan pada pembentukan sikap patriotisme dan meningkatkan kesadaran nasional. Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan warga negara yang menghargai serta mencintai tanah air serta berperan aktif dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Untuk mendukung tujuan tersebut, pada tahun 1946 Kementerian Pendidikan menerbitkan pedoman bagi para pendidik yang memuat berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan serta nilai-nilai kewarganegaraan yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Negara Republik Indonesia. Pedoman tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam pembentukan karakter bangsa[2].

Perkembangan pendidikan Islam selama periode Orde Baru menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, meskipun hasilnya masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas serta memperluas perkembangan pendidikan Islam, pemerintah Orde Baru menerapkan sejumlah kebijakan dan melakukan berbagai pembaruan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan Islam memperoleh posisi yang lebih jelas dalam Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis yang mengukuhkan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional secara resmi. Menurut Haidar Putra Daulay, keterlibatan pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan dan kemajuannya. Perkembangan tersebut selanjutnya dapat dipahami melalui tiga aspek pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Islam memiliki posisi sebagai bagian dari pendidikan formal yang landasan pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20. Selain itu, Pendidikan Islam juga mencakup jalur pendidikan nonformal yang diatur pada Pasal 26, jalur informal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27, pendidikan anak usia dini yang tercantum dalam Pasal 28, serta pendidikan keagamaan yang memiliki dasar hukum dalam Pasal 30.
 - b. Kedudukan Pendidikan Islam sebagai salah satu mata pelajaran memiliki peran penting dalam proses penyusunan kurikulumnya ditujukan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan peserta didik, membentuk akhlak yang luhur, serta mengakomodasi keberagaman potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dan lingkungan.
 - c. Nilai-nilai ajaran Islam yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada hakikatnya mengarah pada upaya mewujudkan kemanfaatan, kesejahteraan, dan kebaikan yang dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Nilai tersebut juga mencakup prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis, egaliter, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Institusi pendidikan Islam yang memadukan ciri khas pesantren dengan sistem madrasah telah melalui suatu proses pembaruan serta modernisasi, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Pembaruan tersebut mencakup penyempurnaan kurikulum, penguatan kelembagaan, perbaikan sistem manajemen dan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga upaya meningkatkan mutu institusi Islam. Pada era Orde Baru, berbagai lembaga pendidikan Islam nonformal turut berkembang, salah satunya Majelis Taklim yang bernaung dalam BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim). Selain itu, periode ini juga ditandai dengan tumbuhnya sejumlah institusi dan organisasi bercorak Islam, seperti Bank Muamalat Indonesia dalam bidang keuangan, Harian Umum Republika di sektor penerbitan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai organisasi sosial-intelektual, Bayt Alquran, Festival Istiqlal, serta penguatan sistem peradilan Islam yang salah satunya diwujudkan melalui Undang-Undang tentang Peradilan Agama[5].

Pendidikan Islam Masa Reformasi

Pada era reformasi, arah kebijakan pendidikan nasional mengalami perubahan dengan menitikberatkan pada pembentukan masyarakat madani yang berkarakter, beridentitas nasional, serta berlandaskan pada nilai-nilai budaya Indonesia. Pendidikan diarahkan guna membentuk individu yang memiliki kualitas kepribadian serta berlandaskan pada keyakinan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi akhlak terpuji, serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, terampil, kreatif, kompetitif, serta mampu beradaptasi dan berkarya secara profesional dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, pendidikan tidak semata-mata menitikberatkan pada kemampuan menguasai pengetahuan, melainkan turut mengedepankan pembentukan kepribadian serta penanaman dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.. Pada periode ini, institusi pendidikan Islam di Indonesia sebagian besar terdiri atas pesantren dan madrasah yang tetap mempertahankan peran strategisnya dalam mencetak generasi Muslim. Pesantren memiliki sistem pendidikan yang khas dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal pada umumnya. Pembelajaran di pesantren masih mempertahankan tradisi keilmuan Islam yang divariasikan dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Selain itu, kehidupan di lingkungan pesantren mencerminkan semangat kebersamaan, kesederhanaan, persaudaraan, persamaan, kemandirian, serta tanggung jawab. Para santri tidak hanya diarahkan untuk memperoleh pengakuan akademik berupa ijazah, tetapi juga dibina agar memiliki integritas moral, rasa percaya diri, dan kemampuan menghadapi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi ciri khas pendidikan pesantren yang terus dipertahankan dan dikembangkan pada era Reformasi[2].

Pada masa Reformasi, sistem pendidikan nasional terus mengalami pembenahan dan pengembangan. Berbagai lembaga pendidikan Islam mulai memperoleh pengakuan secara resmi melalui landasan hukum yang jelas, disertai dengan upaya modernisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, perhatian pemerintah juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan serta profesionalisme guru dan dosen sebagai unsur utama yang berperan penting dalam menjalankan dan memajukan dunia pendidikan[15].

Secara umum, reformasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menata dan memperbaiki kembali suatu kondisi yang mengalami kekacauan melalui langkah-langkah berupa pengurangan, pembaruan, maupun penggantian terhadap hal-hal yang dianggap perlu. Dalam sejarah Indonesia, era Reformasi merujuk pada periode yang dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan terus berlangsung hingga saat ini. Berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto terjadi karena pemerintah dinilai belum berhasil mewujudkan kondisi Indonesia yang aman, tenteram, tertib, sejahtera, serta menjunjung prinsip-prinsip demokrasi.

Pada era Reformasi, pemerintah berupaya melakukan pembenahan, evaluasi, serta penyempurnaan terhadap berbagai kelemahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru. Perbaikan tersebut mencakup berbagai bidang, seperti politik, perekonomian, keamanan, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi terciptanya kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, mencapai kemakmuran, serta menikmati kesejahteraan secara menyeluruh terwujudnya kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, mencapai kemakmuran, serta menikmati kesejahteraan secara menyeluruh. Sejalan dengan tujuan utama Reformasi yang menitikberatkan pada upaya memperbaiki, mengoreksi, dan menyempurnakan berbagai aspek kehidupan

bernegara, pendidikan Islam pada periode ini turut mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sehingga kondisinya menjadi lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru.

Dibandingkan dengan masa Orde Lama dan Orde Baru, penyelenggaraan pendidikan pada saat era Reformasi mengalami perkembangan atau kemajuan yang lebih signifikan. Pemerintah secara berkelanjutan melakukan pembenahan terhadap sistem pendidikan nasional, baik melalui aspek regulasi dan kebijakan hukum, peningkatan dukungan anggaran, maupun pengembangan kualitas sumber daya manusia. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala dan kekurangan, berbagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada masa Reformasi terus diupayakan dan disempurnakan secara bertahap[5].

4. KESIMPULAN

Masuknya Islam di Indonesia berasal dari berbagai jalur, Adapun salah satunya yaitu melalui jalur perdagangan dengan pedagang Arab, Persia, dan India. Masuk dan berkembangnya ajaran Islam di wilayah Indonesia terjadi melalui sebuah proses yang berlangsung secara perlahan dan bertahap, melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Penerimaan Islam oleh masyarakat lokal melibatkan proses adaptasi dan sinkretisme dengan kepercayaan dan praktik lokal yang sudah ada sebelumnya. Ulama dan Pesantren berkontribusi besar dalam menyebarluaskan dan menyampaikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan tuntunan ajaran Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, serta mempertahankan tradisi keagamaan. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang intensif, menghasilkan ulama terdidik, dan menjaga kontinuitas ajaran Islam. Ulama berperan sebagai penafsir Al-Qur'an, pengajar agama, penyebar ilmu Islam, pemberi fatwa, dan pemimpin spiritual. Pada masa sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, Islam memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan dan pembentukan kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh Islam tidak terbatas pada ranah keagamaan, tetapi turut tercermin dalam pembentukan tata nilai sosial, prinsip-prinsip moral, sistem hukum, serta berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, ajaran dan nilai-nilai Islam juga menjadi bagian dari berbagai gerakan sosial, termasuk perjuangan melawan kolonialisme dan tindakan penindasan, serta upaya masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai kemerdekaan.

Pada periode sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, perkembangan Islam di Nusantara berlangsung melalui proses penyesuaian yang kuat dengan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat setempat. Agama ini mengakomodasi unsur-unsur kearifan lokal dalam praktik ibadah dan adat-istiadat keagamaan. Selain itu, masyarakat Indonesia pada masa itu juga menunjukkan sikap toleransi dan pluralisme terhadap agama-agama lain, menjalin interaksi yang harmonis antarumat beragama. Selama masa pra-kemerdekaan, berbagai lembaga Islam berkembang di Indonesia, seperti pesantren, madrasah, masjid, dan majelis-majelis agama. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berperan dalam memberikan pembelajaran keagamaan, tetapi juga menjadi wadah bagi berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Tidak hanya berperan dalam memberikan pembelajaran keagamaan, tetapi juga menjadi wadah bagi berbagai aktivitas dinamika yang terjadi dalam aspek sosial, perekonomian, serta kehidupan politik di tengah masyarakat. Mereka membentuk struktur sosial yang kuat dan memberikan sumbangan penting dalam peradaban Islam di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa perkembangan penelitian dan pemahaman tentang peradaban Islam di Indonesia terus berlanjut. Oleh karena itu, sumber-sumber terkini, seperti jurnal atau publikasi terkait, dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan mutakhir tentang topik ini[20].

REFERENCES

- [1] E. Susilawati and H. Kurnia, "Perkembangan Agama Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan," *Innov. Multidiscip. Educ. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 87–103, 2024, doi: 10.61476/rn6t9m96.
- [2] A. Jafarul Musadad, "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Di Indonesia," *Thaqaifiyyat J. Bahasa, Perad. dan Inf. Islam*, vol. 20, no. 1, pp. 1–23, 2021, doi: 10.14421/thaq.2021.20101.
- [3] R. Hidayat, K. Nisa, M. Zaini, D. Safitri, and B. I. Astini, "Realita Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan," *QuranicEdu J. Islam. Educ.*, vol. 4, no. 2, pp. 188–204, 2024, [Online]. Available: <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu>
- [4] H. Harmonedi and M. Zalnur, "Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan," *Belajea; J. Pendidik. Islam*, vol. 5, no. 2, p. 309, 2020, doi: 10.29240/belajea.v5i2.1331.
- [5] S. Sofyan, "Eksistensi Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Pra dan Pasca Kemerdekaan," *Al Qalam J. Ilm. Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 1, p. 344, 2022, doi: 10.35931/aq.v16i1.856.
- [6] A. Info, "Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Emi Nurmila 1 1," vol. 2, no. 1, pp. 10–22, 2026.
- [7] I. I. J. Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, *No Title 済無No Title No Title No Title*, vol. 2, 2024.

- [8] H. Munthe and Z. Dahlan, “Panggung Geografis Peradaban Islam,” *Integr. J. Stud. Islam dan Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 73–91, 2024, doi: 10.56114/integrasi.v2i1.11317.
- [9] A. Fadilah, “Islam Indonesia: Diskursus Islam Politik Vis-a-Vis Islam Kultural Dari Pra-Kemerdekaan Hingga Era Reformasi,” *Ushuluna J. Ilmu Ushuluddin*, vol. 1, no. 2, pp. 118–130, 2020, doi: 10.15408/ushuluna.v1i2.15340.
- [10] B. Y. Posha, “Perkembangan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan,” *Historia Santiago.*, vol. 3, no. 2, p. 75, 2015, doi: 10.24127/hj.v3i2.84.
- [11] A. R. Rahman, “Perkembangan Islam Di Indonesia Masa Kemerdekaan (Suatu Kajian Historis),” *Lensa Budaya J. Ilm. Ilmu-Ilmu Budaya*, vol. 10, no. 2, pp. 117–125, 2018, doi: 10.32489/tasamuh.46.
- [12] Nur Amalia, Lenni Kusmiran, Resky Syahril, Halijah, Kalbi Jafar, and Muhammad Alwi, “Sejarah Peradaban Islam Indonesia Pra Kemerdekaan,” *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 1147–1153, 2025, doi: 10.56799/peshum.v5i1.13774.
- [13] R. H. Ma’afi, “al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam,” *al-Daulah J. Huk. dan Perundangan Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 77–95, 2013.
- [14] R. Azharghany, A. Adim, and H. R. Rusdi, “Paradigma Dakwah Islam Kyai dalam Kancan Politik Kekuasaan Pasca Kemerdekaan di Indonesia,” *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, vol. 21, no. 2, p. 1, 2022, doi: 10.18592/alhadharah.v21i2.7184.
- [15] D. Pendidikan, I. Pasca, and T. Institusi, “Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Indonesia : Antara Kebijakan , Transformasi Institusi , dan Peran Tokoh Pembaru,” vol. 16, pp. 221–246, 2026.
- [16] I. Radiah, “DI INDONESIA : Pilar Pendidikan dan,” vol. 7, no. 1, pp. 48–59, 2026, doi: 10.30821/islamijah.v7i1.29702.
- [17] Sri Nilawati, Hifza, and Andi Achruh, “Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan,” *PIJAR J. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 2, no. 1, pp. 108–115, 2023, doi: 10.58540/pijar.v2i1.492.
- [18] A. Andini *et al.*, “Peradaban Islam Di Nusantara Masa Orde Baru Dan Perkembangan Pendidikan Islam,” vol. 3, no. 2, pp. 496–502, 2026.
- [19] L. Ridwanuloh, M. M. N. Umam, and A. Mulyana, “Seni Tulis Arab Di Nusantara: Perkembangan Kaligrafi Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945–1985),” *Jazirah J. Perad. dan Kebud.*, vol. 5, no. 02, pp. 132–155, 2024, doi: 10.51190/jazirah.v5i02.164.
- [20] M. Subhan, “Peradaban Islam di Indonesia Masa Pra-Kemerdekaan,” pp. 165–167, 2023.